

TARGET PEREKONOMIAN

UNTUK MEREDUKSI PENGANGGURAN SUMATERA

(PENERAPAN HUKUM OKUN DI SUMATERA 2018)

Oleh : Kuswan Gunanto dan Rita Rif'ati

Pulau Sumatera atau kadang dikenal dengan sebutan pulau Percha, pulau Andalas, ataupun pulau Swarnadwipa merupakan pulau besar dikelilingi beberapa pulau pulau kecil. Pulau Sumatera berikot pulau - pulau di sekitarnya (selanjutnya akan disebut sebagai Sumatera) setidaknya didiami 57.940.351 jiwa penduduk.

Kondisi geografis Sumatera terletak pada posisi antara 6°LU-6°LS dan 95°BB-109°BT. Dengan bentuk memanjang dari Kuta Raja dibagian utara sampai Tanjung Cina dibagian selatan. Dibagian barat terbentang Bukit Barisan, yang membujur dari utara hingga selatan.

Sumatera terdiri dari 10 provinsi, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau. Dari 10 provinsi di Sumatera tersebut terdiri dari 154 kabupaten/kota, dan 1.936 kecamatan.

Sumatera berhasil menjaga pertumbuhan ekonomi yang stabil. Dalam lingkungan ekonomi global muncul istilah kondisi "normal yang baru", yaitu kondisi suatu periode di mana

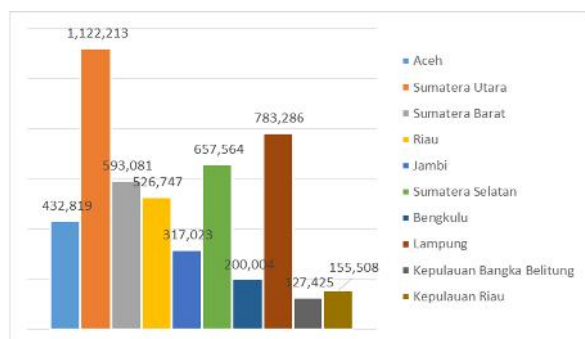
pertumbuhan ekonomi lebih rendah dibandingkan periode sebelum krisis finansial global pada 2008. Istilah ini dipergunakan Mohamed A. El-Erian, Kepala PIMCO.

Todaro (2000) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan faktor penting yang mendorong penciptaan kesempatan kerja. Karena keberadaan tenaga kerja sebagai bagian dalam suatu sistem perekonomian, maka perencanaan tenaga kerja dengan pembangunan ekonomi harus memiliki argumentasi yang sangat logis dan ilmiah.

POTRET PEREKONOMIAN SUMATERA

Hasil Sensus Ekonomi 2016 menunjukkan bahwa terdapat 26.711.001 usaha/perusahaan yang ada diseluruh Indonesia, dan Sumatera berkontribusi 18,61 persen dengan 4.915.670 usaha/perusahaan. Bila dirinci berdasar skala usaha, terdapat 4.841.653 (98,50%) Usaha Mikro Kecil (UMK) dan 74.017 (1,50%) Usaha Menengah Besar (UMB). UMK menyerap 10.202.866 tenaga kerja, sedangkan UMB mampu menyerap 2.199.543 tenaga kerja.

Gambar 1. Jumlah Usaha/Perusahaan Di Sumatera 2016



Sumber: BPS, diolah

Menjaga Stabilitas, Mengejar Pertumbuhan Ekonomi

Prof Simon Kuznet (1955) dalam Jinghan (2000) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya, kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologinya dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukan.

Sedangkan M.P Todaro (1998) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai suatu proses yang mantap dimana kapasitas produksi dari suatu perekonomian meningkat sepanjang waktu untuk menghasilkan tingkat pendapatan nasional yang semakin besar.

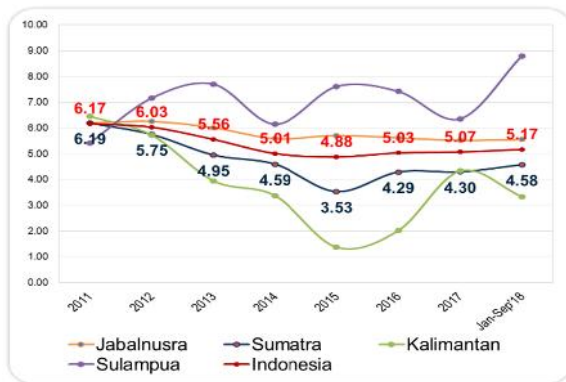
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui kondisi ekonomi makro suatu wilayah. Selain itu, juga biasa digunakan sebagai alat untuk mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Jika besaran PDRB tinggi maka diharapkan mampu menggambarkan kesejahteraan ekonomi di wilayah tersebut juga tinggi dan berlaku juga sebaliknya.

Pertumbuhan ekonomi di Sumatera sampai triwulan III-2018 sebesar 4,58 persen. Masih berada dibawah Nasional yang sebesar 5,17 persen. Namun dalam empat tahun terakhir, perekonomian Sumatera menunjukkan tren positif dan stabil.

Pertumbuhan ekonomi Sumatera berturut-turut sejak 2015 adalah 3,53, 4,29, 4,30 dan 4,58. Bahkan pertumbuhan ekonomi Sumatera diatas angka nasional pada tahun 2011. Bila dicermati lebih dalam, maka terlihat bahwa Sumatera mampu terjaga stabilitas perekonomiannya. Buah konsistensi dalam menjaga stabilitas ekonomi akan tercermin pada inflasi yang rendah dan stabil, ketahanan perbankan dan sistem keuangan yang kuat.

Berbeda dengan Sumatera, di Sulampua (Sulawesi, Maluku, dan Papua), ekonomi selalu tumbuh diatas nasional tapi mengalami fluktuasi yang tinggi. Begitu juga Kalimantan, fluktuatif tapi dibawah angka nasional.

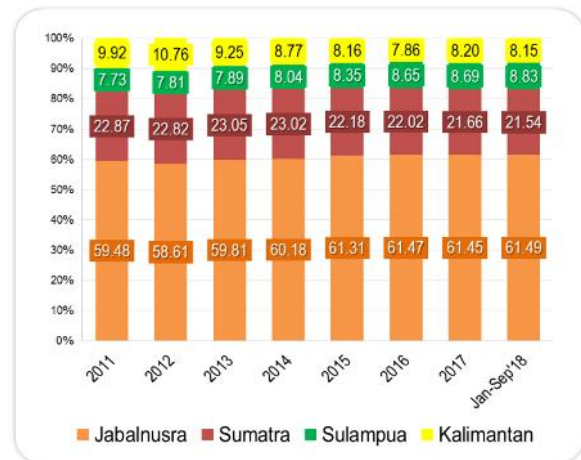
Gambar 2. Pertumbuhan ekonomi menurut wilayah/regional Sumatera.



Sumber: BPS, diolah.

Dilihat dari kontribusi PDRB maka ditunjukkan bahwa dalam beberapa terakhir ini, kontribusi Sumatera semakin kecil terhadap nasional. Dari 22,18 persen pada tahun 2015 menjadi 21,54 persen terhadap Nasional pada September 2018. Sedangkan kontribusi yang makin membesar ditunjukkan oleh wilayah Sulampua (Sulawesi, Maluku dan Papua) dan Jabalnusra (Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara). Kontribusi PDRB Regional Sulampua meningkat dari 8,35 persen menjadi 8,83 persen. Begitu juga untuk Jabalnusra, dari 61,31 persen menjadi 61,49 persen. Sehingga apa yang terjadi di perekonomian Jabalnusra mampu mengubah arah perekonomian nasional.

Gambar 3. Distribusi Persentase PDRB Sumatera 2011-2018



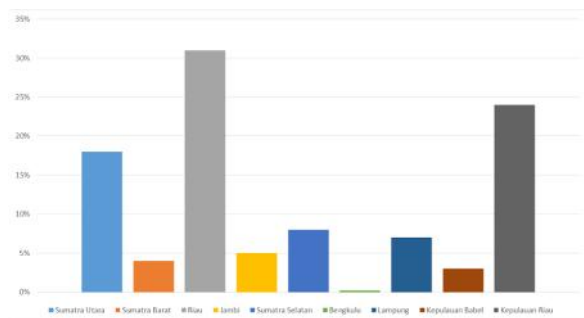
Sumber: BPS, diolah

Ekspor Sumatera

Ekspor dan impor merupakan kegiatan transaksi barang dan jasa antara penduduk suatu wilayah dengan penduduk wilayah lain termasuk dengan negara lain, baik melalui udara, laut dan darat. Ekspor dan impor meliputi barang, jasa pengangkutan, jasa asuransi, jasa komunikasi dan berbagai jasa lainnya. Ekspor barang dinilai dengan harga f.o.b (*free on board*) sedangkan impor jasa dinilai dengan harga c.i.f (*cost of insurance, and freight*). Ekspor dinilai pada saat barang tersebut diberikan ke bukan penduduk domestik, sedangkan impor dinilai pada saat barang tersebut diterima oleh penduduk. Termasuk dalam kegiatan ekspor adalah pembelian langsung barang dan jasa di wilayah domestik suatu daerah oleh bukan penduduk daerah tersebut.

Ekspor memegang peran penting dalam perekonomian suatu negara atau daerah. Secara nasional, Sumatera memberikan kontribusi ekspor sekitar 30 persen, dengan nilai Rp6,03 Milyar US\$ pada tahun 2017.

Gambar 4. Nilai Ekspor Sumatera 2017



Sumber: BPS, diolah

Provinsi Riau dan Kepulauan Riau menjadi penyumbang ekspor terbanyak di Sumatera. Bahkan gabungan kedua provinsi ini mempunyai kontribusi lebih dari 50 persen. Ekspor provinsi Riau dan Kepulauan Riau yang banyak mengandalkan sektor lumbung energi dan sumber daya alam mempunyai berbagai keuntungan dan kekurangan. Ekspor kedua provinsi ini sangat tergantung dari permintaan atau harga komoditi dunia.

Investasi di Sumatera

Dalam teori ekonomi, investasi berarti pembelian (dan berarti juga produksi) dari kapital/modal barang-barang yang tidak dikonsumsi tetapi digunakan untuk produksi yang akan datang dengan suatu harapan mendapatkan keuntungan dimasa depan.

Sumber penanaman modal dalam bentuk investasi ini dapat berasal penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA).

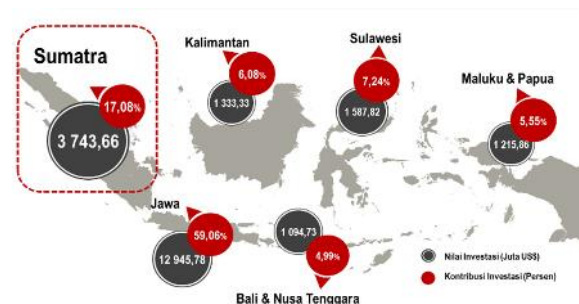
Bila dilihat hubungan antara tingkat pertumbuhan ekonomi dan investasi mempunyai hubungan timbal balik yang positif. Artinya semakin besar investasi suatu wilayah/negara, maka akan semakin besar

tingkat pertumbuhan ekonomi yang bisa dicapai.

Investasi salah satu buah dari kondisi perekonomian yang kondusif. Dengan kondisi yang stabil maka para investor merasa aman untuk meletakkan investasi ke Sumatera.

Peran Sumatera dalam posisi investasi PMA di Indonesia mencapai 17,08 persen. Sumatera menjadi incaran pemodal asing untuk menanamkan modalnya setelah Jawa yang menarik lebih dari separuh investor asing.

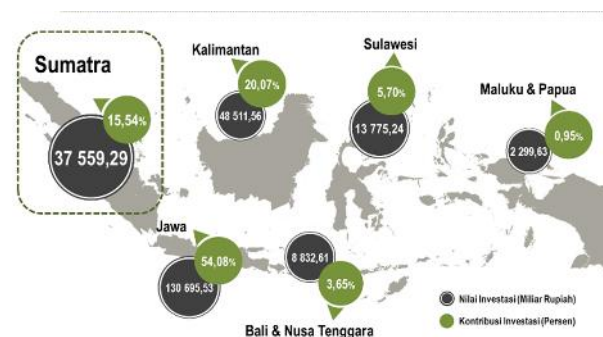
Gambar 5. Struktur Investasi PMA Sumatera



Sumber: BPS, diolah

Dari kacamata investor dalam negeri, struktur investasi PMDN tetap memilih Jawa, Kalimantan dan Sumatera. Lebih dari separuh investor dalam negeri juga menanamkan modal di Jawa. Disusul oleh Kalimantan dengan 20,07 persen, dan Sumatera 15,54 persen.

Gambar 6. Struktur Investasi PMDN Sumatera



Sumber: BPS, diolah

Posisi Provinsi-provinsi di Sumatera

Jika dilihat per provinsi, maka terdapat tiga provinsi yang mempunyai pertumbuhan yang lebih rendah dari pertumbuhan Sumatera adalah Aceh, Riau, dan Kepulauan Riau. Sedangkan tujuh provinsi lain masih berada di atas rata-rata. Walaupun hanya tiga provinsi, namun mempengaruhi perekonomian secara regional. Hal ini juga menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Sumatera sangat tergantung terhadap pertumbuhan provinsi Riau dan Sumatera Utara yang mempunyai kontribusi sebesar 23,57 persen dan 22,84 persen.

Dalam 2 tahun terakhir, perbaikan perekonomian di triwulan III-2018 terjadi di semua provinsi. Karena sampai September 2018, perekonomian provinsi sudah melebihi capaian tahun 2017, kecuali Sumatera Barat. Namun dengan menyisakan satu triwulan lagi, memungkinkan untuk Sumatera Barat melebihi capaian tahun lalu.

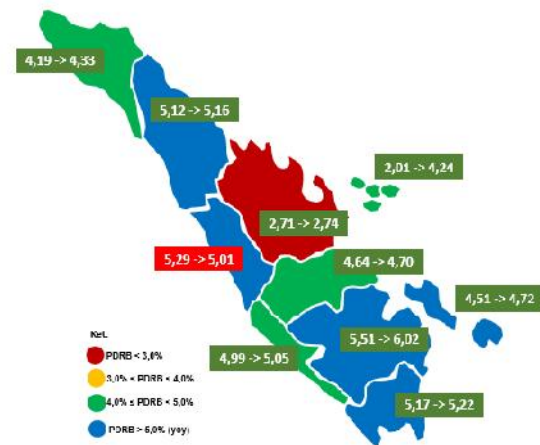
Gambar 7. Pertumbuhan Ekonomi Sumatera (C-to-C)

Provinsi	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Jan-Sep 2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	3,85	2,61	1,55	-0,73	3,30	4,19	4,33
Sumatra Utara	6,45	6,07	5,23	5,10	5,18	5,12	5,16
Sumatra Barat	6,31	6,08	5,88	5,53	5,27	5,29	5,01
Riau	3,76	2,48	2,71	0,22	2,23	2,71	2,74
Jambi	7,03	6,84	7,36	4,21	4,37	4,64	4,70
Sumatra Selatan	6,83	5,31	4,79	4,42	5,04	5,51	6,03
Bengkulu	6,83	6,07	5,48	5,13	5,29	4,99	5,05
Lampung	6,44	5,77	5,08	5,13	5,15	5,17	5,22
Kepulauan Babel	5,50	5,20	4,67	4,08	4,11	4,51	4,72
Kepulauan Riau	7,63	7,21	6,60	6,02	5,02	2,01	4,24
Indonesia	6,03	5,56	5,01	4,88	5,03	5,07	5,17

Sumber: BPS, diolah

Yang paling tinggi pencapaian pertumbuhan ekonominya hingga September 2018 adalah Kepulauan Riau dari 2,01 persen menjadi 4,24 persen.

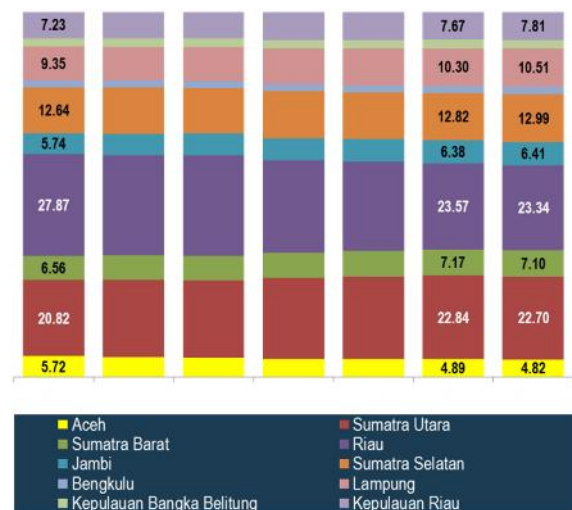
Gambar 8. Pergerakan Pertumbuhan Ekonomi Sumatera (C-to-C) 2017-2018



Sumber: BPS, diolah

Bila dirinci per provinsi maka kontribusi masing-masing provinsi terdapat pada gambar berikut.

Gambar 9. Kontribusi PDRB Sumatera per Provinsi 2011-2018



Sumber: BPS, diolah

Selama tiga tahun terakhir, kontribusi tujuh provinsi meningkat, kecuali tiga provinsi. Provinsi yang dimaksud adalah Aceh, Riau dan Kepulauan Bangka Belitung. Kontribusi Aceh menyusut dari 5,00 persen menjadi 4,82 persen,

Riau dari 25,26 persen menjadi 23,34 persen dan Kepulauan Bangka Belitung dari 2,36 persen menjadi 2,27 persen.

Tiga provinsi yang mempunyai peningkatan kontribusi yang paling besar adalah Lampung, Sumatera Utara, dan Jambi. Lampung dari 9,79 persen menjadi 10,51 persen. Sumatera Utara meningkat dari 22,12 persen menjadi 22,70 persen, sedangkan Jambi dari 6,00 persen menjadi 6,41 persen. Atau bisa dikatakan bahwa ketiga provinsi tersebut mengalami perbaikan perekonomian yang cepat.

POTRET KETENAGAKERJAAN SUMATERA

Jumlah penduduk yang cukup besar di satu sisi merupakan potensi, baik dari sisi penyediaan tenaga kerja maupun pangsa pasar yang potensial bagi perekonomian. Tentu saja modal ini akan dapat dimanfaatkan dengan baik jika memiliki kualifikasi dan kemampuan yang mendukung bagi terlaksananya program pembangunan. Namun perlu juga diingat tingginya jumlah penduduk dengan kualifikasi rendah juga menimbulkan potensi masalah tersendiri bagi pembuat kebijakan.

Tabel 1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Sumatera 2017-2018

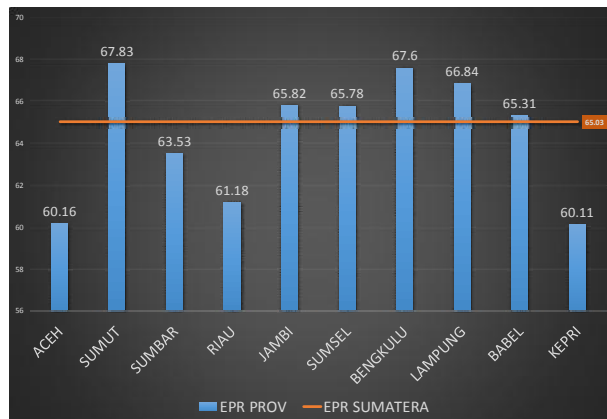
PROVINSI	TPT 2017	2018	TPAK 2017	2018
Aceh	6.57	6.36	63.74	64.24
Sumatera Utara	5.60	5.56	68.88	71.82
Sumatera Barat	5.58	5.55	66.29	67.26
Riau	6.22	6.20	64.00	65.23
Jambi	3.87	3.86	67.52	68.46
Sumatera Selatan	4.39	4.23	69.50	68.69
Bengkulu	3.74	3.51	69.30	70.06
Lampung	4.33	4.06	67.83	69.67
Bangka Belitung	3.78	3.65	66.72	67.79
Kepulauan Riau	7.16	7.12	66.41	64.72
Sumatera	5.20	5.10	67.33	68.52
Nasional	5.50	5.34	66.67	67.26

Sumber: BPS, diolah.

Tingkat Partisipasi Angkatan kerja (TPAK) adalah salah satu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada aktifitas utama selama seminggu terakhir. Nilai TPAK memberikan indikasi potensi ekonomi dari sisi pasokan (supply) tenaga kerja. Secara keseluruhan nilai TPAK di Sumatera berada di atas angka nasional. Provinsi Sumatera Utara adalah provinsi yang penduduk usia kerjanya paling aktif secara ekonomi, disusul dengan Bengkulu, Sumatera Selatan dan Lampung. Sedangkan TPAK terendah adalah Aceh. Dilihat menurut komposisi jenis kelamin, TPAK laki-laki mendominasi hampir di semua provinsi dibandingkan perempuan. TPAK perempuan tertinggi ada di Provinsi Sumatera Utara, sedangkan TPAK laki-laki tertinggi ada di Provinsi Lampung.

Rasio penduduk bekerja dibandingkan dengan jumlah penduduk usia kerja (15 tahun keatas) dinyatakan dalam EPR (*employment to population ratio*). Angka EPR Sumatera sebesar 65,03 yang dapat diartikan dari 100 orang penduduk berumur 15 tahun ke atas terdapat sekitar 65 orang yang bekerja. Provinsi dengan angka EPR dibawah rata-rata pulau Sumatera antara lain : Aceh (60,16), Sumatera Barat (63,53), Riau (61,18) dan Kepulauan Riau (60,11). Enam provinsi selebihnya memiliki nilai EPR di atas rata-rata, atau bisa juga diartikan bahwa jumlah penduduk bekerja diantara 100 orang penduduk umur 15 tahun lebih besar atau di atas rata-rata.

Gambar 10. EPR Provinsi di Sumatera 2018



Memaknai Angka Pengangguran

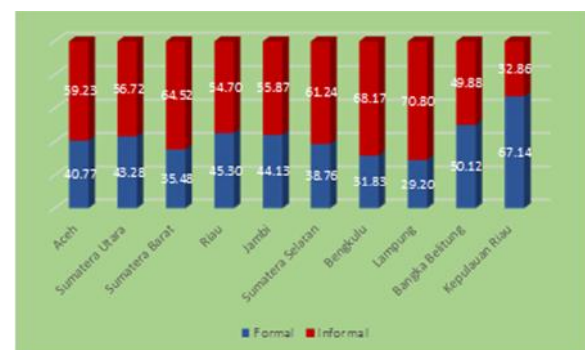
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. Dalam rentang waktu 1 tahun terakhir terlihat bahwa angka TPT di Sumatera mengalami penurunan dan berada di bawah angka nasional. Provinsi dengan nilai TPT terkecil adalah Bengkulu, Bangka Belitung dan Jambi. Sedangkan angka TPT tertinggi ada di Kepulauan Riau, Aceh dan Riau.

Beberapa Kepala Daerah cukup puas dengan capaian rendahnya angka pengangguran di wilayahnya. Tingginya jumlah pengangguran di suatu wilayah di satu sisi memang berpotensi menimbulkan masalah sosial, namun angka pengangguran yang terlalu rendah juga harus dimaknai secara lebih hati-hati. Angka pengangguran yang rendah menandakan kecilnya jumlah pencari kerja bisa jadi karena mereka tidak yakin mendapatkan pekerjaan atau bahkan berhenti mencari pekerjaan dalam waktu yang cukup lama tapi tidak mendapatkannya. Selain itu angka pengangguran yang rendah tidak serta merta menggambarkan pasar kerja yang kondusif untuk mencari pekerjaan, sedangkan angka pengangguran yang lebih tinggi menandakan para pencari kerja

berbondong-bondong memasuki pasar kerja yang lebih menguntungkan. Provinsi dengan keunggulan komoditas dan kekuatan manufaktur yang cukup kuat dapat saja menarik sejumlah pencari kerja dari wilayah sekitar untuk ikut mencoba mencari peruntungan, sehingga memiliki angka TPT lebih tinggi. Sebaliknya rendahnya angka pengangguran di provinsi dengan komoditas yang cukup terbatas cenderung rendah karena sedikitnya orang yang terlibat dalam pasar kerja dan mereka cenderung enggan menganggur karena lebih mudah tertampung dalam sektor informal.

Hal ini bisa dilihat pada kepulauan Riau dengan tingkat pengangguran tertinggi sebesar (7,12 persen) dimana penduduk bekerja didominasi oleh pekerja formal (67,14 persen) yang sebagian besar terserap di sektor industri pengolahan (23,4 persen) jasa-jasa (23,4 persen) serta perdagangan (19,4 persen). Sedangkan penyerapan tenaga kerja sektor pertanian dibawah 10 persen. Sebaliknya Provinsi dengan tingkat pengangguran terendah adalah Bengkulu (3,51 persen) dengan dominasi pekerja di sektor informal sebesar 67,17 persen (tertinggi kedua setelah Provinsi Lampung). Pekerja di sektor pertanian tertinggi dibanding provinsi lain di Sumatera yaitu sebesar 49,3 persen, sisanya para pekerja terserap di sektor perdagangan (15,8 persen) dan jasa-jasa (15,5 persen).

Gambar 11. Pekerja Formal dan Informal Sumatera 2018



Sumber: BPS, diolah

Selain itu faktor disparitas upah antar wilayah turut menimbulkan andil yang menarik minat para pencari kerja. Data Upah Minimum Provinsi tertinggi di Sumatera terdapat pada Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau. Namun demikian provinsi Babel dan Sumsel penyerapan tenaga kerja dominan di sektor pertanian serta perdagangan.

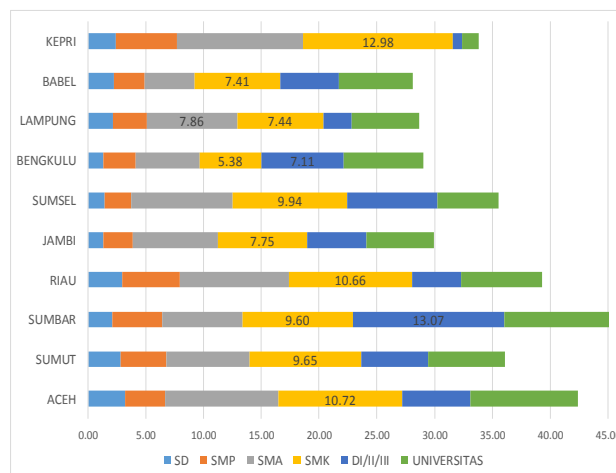
Tabel 2 Upah Minimum Provinsi di Sumatera 2018

Provinsi	UMP (Rp)
Aceh	1.900.000
Sumatera Utara	1.625.000
Sumatera Barat	1.615.000
Riau	1.878.000
Kepulauan Riau	1.954.000
Jambi	1.710.000
Sumatera Selatan	1.974.346
Bangka Belitung	2.100.000
Bengkulu	1.500.000
Lampung	1.581.000

Sumber: BPS, diolah

Dilihat dari tingkat pendidikannya, penganggur di Sumatera didominasi oleh lulusan SMK, kecuali untuk Provinsi Bengkulu dan Sumatera Barat (tertinggi adalah lulusan DI/II/III), serta Lampung (tertinggi lulusan SMA). Hal ini menggambarkan bahwa lulusan SMK tidak cukup beruntung di pasar kerja, perlu vokasi yang lebih tepat pada kurikulum SMK sesuai yang dibutuhkan oleh pasar kerja yang tersedia.

Gambar 12. Pengangguran Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Sumatera 2018



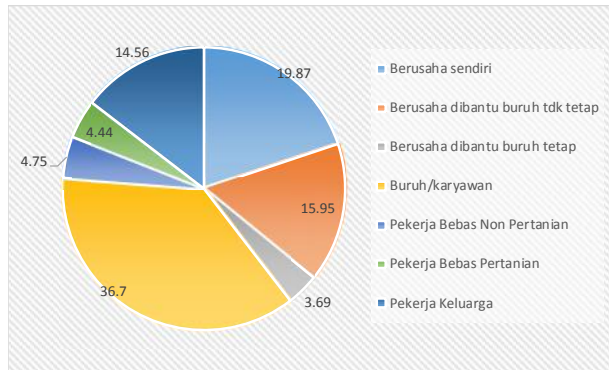
Sumber: BPS, diolah

Sektor utama yang menyerap tenaga kerja di Sumatera yaitu Pertanian (39,1 persen), Perdagangan (17,4 persen) serta Industri Pengolahan (8,88 persen). Dengan komposisi yang berbeda untuk masing-masing provinsi. Sektor jasa meliputi jasa keuangan dan asuransi, jasa perusahaan, administrasi pemerintahan, jasa pendidikan, jasa kesehatan serta jasa lainnya jika digabungkan mampu menyerap tenaga kerja sebesar 17 persen.

Karakteristik Pekerja di Sumatera

Dilihat dari status pekerjaan, tenaga kerja di Sumatera didominasi oleh pekerja dengan status buruh/karyawan/pegawai (sebesar 36,7 persen), disusul dengan status berusaha sendiri (19,87 persen) dan berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja tidak dibayar (15,95 persen). Sementara itu pekerja keluarga menempati persentase di atas 10 persen hampir di setiap provinsi kecuali Kepulauan Riau yang hanya mencapai 4,4 persen.

Gambar 13.
Penduduk Bekerja Menurut Status 2018



Dilihat dari jumlah jam kerja selama seminggu terakhir, diantara 26,5 juta penduduk yang bekerja di Sumatera ada 34 persen diantaranya yang bekerja di bawah jam kerja normal (35 jam) sehingga mereka digolongkan ke dalam pekerja tidak penuh atau setengah pengangguran (baik terpaksa maupun sukarela). Mereka yang tergolong ke dalam setengah pengangguran terpaksa adalah penduduk bekerja di bawah 35 jam dan masih berusaha mencari pekerjaan lain, jumlahnya sekitar 2,29 juta atau sekitar 8,6 persen. Sedangkan pekerja paruh waktu atau setengah penganggur sukarela jumlahnya sekitar 6,7 juta atau 25,5 persen dari penduduk bekerja.

BERLAKUKAH HUKUM OKUN DI SUMATERA?

Okun dalam artikelnya pada tahun 1962 menyajikan dua hubungan empiris yang menghubungkan tingkat pengangguran dan output riil, yang kemudian dikenal menjadi Hukum Okun. Menurut Okun, terdapat hubungan yang terjadi dalam waktu yang bersamaan antara pertumbuhan output dan perubahan dalam pengangguran yaitu, bagaimana output tumbuh bervariasi secara bersamaan dengan perubahan dalam tingkat pengangguran.

Setidaknya ada empat versi dalam memahami hukum Okun. *The difference version, the gap version, the dynamic version, dan production-function version*. Dalam tulisan ini, akan dibahas versi pertama yaitu *the difference version*.

Hasil observasi terhadap data GDP Amerika Serikat mendasari konsep dari hukum Okun. Hukum Okun menjelaskan bahwa tingkat pengangguran memiliki hubungan negatif dengan GDP riil. Peningkatan pengangguran cenderung dikaitkan dengan rendahnya pertumbuhan GDP riil. Ketika tingkat pengangguran meningkat, maka GDP riil cenderung tumbuh lebih lambat atau bahkan turun.

Model persamaan yang digunakan sesuai dengan *difference version* Hukum Okun, yaitu:

$$\Delta U = \alpha + b (\Delta Y/Y)$$

Keterangan :

$\Delta Y/Y$: Pertumbuhan GDP riil

ΔU : Perubahan tingkat pengangguran

b : koefisien Okun (bernilai negatif)

Hukum Okun menggunakan model sederhana dengan meregresikan *first difference* dari tingkat pengangguran (U) terhadap persentase perubahan output ($\Delta Y/Y$). Okun menggunakan data dari 1948 kuartal 2 hingga 1960 kuartal 4 untuk menurunkan persamaan berikut:

$$\Delta U = 0,30 - 0,07 (\Delta Y/Y)$$

Disimpulkan bahwa tanpa adanya pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran akan meningkat 0,3 persentase poin dari satu kuartal ke kuartal berikutnya. Pertumbuhan ekonomi sebesar 1 persen per kuartal atau 4 persen per tahun diperlukan untuk menjaga tingkat pengangguran tetap. Nilai koefisien Okun menyiratkan bahwa setiap poin persentase pertumbuhan output riil di atas 4 persen dikaitkan dengan penurunan tingkat pengangguran 0,07 persentase poin (Knotek, 2007).

Angka 4% merupakan limitasi dari pertumbuhan perekonomian negara yang didekati dengan model dari hukum okun. Suatu negara atau daerah mungkin akan memiliki persamaan hukum yang berbeda sehingga angka limitasinya akan berbeda.

Untuk Sumatera, hasil perhitungan menunjukkan persamaan sebagai berikut:

$$\Delta U = 4,43 - 0,542 (\Delta Y/Y)$$

Aceh	$\Delta U = 2.76 - 0.168 \Delta Y/Y$
Sumut	$\Delta U = 5.60 - 0.074 \Delta Y/Y$
Sumbar	$\Delta U = 5.73 + 0.065 \Delta Y/Y$
Riau	$\Delta U = 2.54 - 0.838 \Delta Y/Y$
Jambi	$\Delta U = 5.90 + 0.135 \Delta Y/Y$
Sumsel	$\Delta U = 5.44 - 0.311 \Delta Y/Y$
Bengkulu	$\Delta U = 5.69 - 0.099 \Delta Y/Y$
Lampung	$\Delta U = 5.59 + 0.171 \Delta Y/Y$
Babel	$\Delta U = 4.93 - 0.113 \Delta Y/Y$
Kepri	$\Delta U = 5.71 + 0.019 \Delta Y/Y$

Hal ini dapat disimpulkan bahwa secara total, hukum Okun berlaku di Sumatera. Ketika tingkat pengangguran meningkat maka GDP cenderung lebih lambat. Dengan koefisien Okun sebesar -0,542 maka dapat diartikan bahwa untuk dengan kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar satu persen mampu menurunkan pengangguran sebanyak 0,542 persen.

Namun bila dirinci per provinsi maka terdapat empat provinsi yang berbeda dengan temuan Okun. Dimana untuk provinsi Sumatera Barat, Jambi, Lampung dan Kepulauan Riau, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, maka TPT makin tinggi. Hal ini diduga bahwa pertumbuhan ekonomi dan investasi di empat provinsi tersebut mengarah kepada kegiatan padat modal dan kurang optimal dalam penyerapan tenaga kerja. Namun hal ini perlu dibuktikan dengan penelitian lebih lanjut.

Dilihat dari nilai koefisien Okun, maka Riau dan Sumatera Selatan yang paling besar nilai koefisiennya. Setiap kenaikan satu persen kenaikan pertumbuhan ekonomi, maka mampu menurunkan 0,838 persen tingkat pengangguran untuk provinsi Riau dan 0,311 persen di Sumatera Selatan.

Nilai koefisien Okun menjadi salah satu komponen penting yang dikaji para ekonom dalam menganalisis hukum Okun. Jika tingkat pengangguran merupakan variabel kebijakan, maka koefisien Okun dapat diinterpretasikan sebagai besaran target perekonomian untuk mereduksi tingkat pengangguran.

Kajian lebih lanjut tentang *Okun's Law* sebaiknya mengarah pada kategori atau sektor ekonomi yang lebih rinci mengingat pola penyerapan tenaga kerja yang berbeda antar sektor perekonomian bergantung pada adopsi teknologi masing-masing.

Setidaknya tulisan ini menjadi kajian awal untuk mendeskripsikan upaya mereduksi pengangguran melalui penetapan target pertumbuhan ekonomi pada lokus kajian.

Daftar Pustaka:

- Jhingan, M.L., 1993, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Todaro, M.P., 1998. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Edisi Keenam, Jakarta: Erlangga.
- Knotek, E.S. (2007). *How Useful is Okun's Law?*. *Economic Review*, 73-103.